

# PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI TAHUN 2024

Novita Mayasari Anggelia<sup>1</sup>, Monisa Alvia<sup>2</sup>, Rina Safitri<sup>3</sup>, Rahmat Maulana<sup>4</sup>, Yunus<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  
Indonesia

E-mail Koresponden: [malfirza30@gmail.com](mailto:malfirza30@gmail.com)

## Abstrak

Pada pemilu tahun 2019 data dari jumlah partisipasi pemilih di kota Palangka Raya sebesar 83,7% dan hal tersebut melebihi target KPU pusat yakni 77,5%. Peningkatan partisipasi pemilih ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi berbagai lembaga terkait salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada pemilih pemula di Kota Palangka Raya melalui penyelenggaraan pendidikan politik menghadapi pemilu 2024 yang bertujuan bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menentukan masa depan negara 5 tahun yang akan datang. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui sejauh mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula di Kota Palangka Raya, serta mengukur sejauh mana ketercapaian hasil program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula. Secara garis besarnya penelitian ini menggambarkan ketercapaian program kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya salah satunya adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan akses penyampaian informasi melalui sosialisasi-sosialisasi kepada siswa-siswa dan mahasiswa perguruan tinggi yang termasuk pemilih pemula. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan, dan menguraikan isi dari program kerja penyelenggaraan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

**Kata kunci:** Peran, Lembaga, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik

## Abstract

*In the 2019 election, data on voter participation in Palangka Raya was 83,7%. It exceeded the central KPU target of 77.5%. This increase in voter participation is influenced by various aspects. Both socialization was carried out by various institutions and through social media. Therefore, it is an essential task for various related institutions, one of which is the National Unity and Politics Agency of Palangka Raya City, to carry out massive outreach to novice voters in Palangka Raya City through organizing political education facing the 2024 elections which aims to highlight the importance of participating in the general election to determine the future of the country in the next five years. This research aims to determine the extent of the role of the National Unity and Politics Agency in implementing Political Education for beginner voters in the City of Palangka Raya, as well as measuring the extent to which the program results of the National Unity and Politics Agency of Palangka Raya City have been achieved in providing Political Education for beginner voters. The research was carried out through observation, interviews, and documentation studies with research subjects. It used qualitative descriptive techniques, where the researcher tried to describe and explain the contents of the work program for organizing political education implemented by the Palangka Raya City National and Political Unity Agency.*

**Key words:** Role, Institution, New Voters, Political Education

## Article History:

Received : 2024-03-11

Revised : 2024-06-26

Accepted : 2024-06-30

## **PENDAHULUAN**

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini masih banyak generasi muda yang tidak melek dengan politik, ataupun apatis terhadap kehidupan politik yang terjadi. Berdasarkan riset IDN Research Institute. Dalam laporan bertajuk "Indonesian Millennial report 2019", hanya 23,4 persen yang suka mengikuti berita politik. Namun, tidak dinyatakan bahwa pemilih millennial tersebut paham akan politik. Menganggap politik sebagai ajang perebutan kekuasaan bagi kaum tirani tetapi tidak melihat politik dari berbagai sisi salah satunya pada hakikatnya adalah politik sebagai sarana penampung dan penyampaian aspirasi masyarakat serta perwujudan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kehidupan generasi muda yang demikian merupakan dampak dari kurangnya pendidikan politik dalam mengajak para generasi muda ini untuk turun serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik yang ada dan berperan sebagai agen perubahan didalamnya.

Generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa yang memiliki peranan yang besar untuk keberlangsungan suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemuda harus memiliki wawasan dan pendidikan yang memadai dalam rangka untuk ikut serta dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa. Selain itu, Generasi muda merupakan para pemilih pemula yang memiliki suara cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga para pemilih pemula diharapkan mampu berkontribusi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sesuai dengan harapan, maka dari itu perlunya memberikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula, Pendidikan politik bagi masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini yaitu Badan KESBANGPOL Kota Palangka Raya yang mempunyai fungsi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan politik dalam negeri melalui pendidikan politik bagi para generasi muda. Pendidikan politik yang diadakan KESBANGPOL Kota Palangka Raya dapat diberikan melalui pendidikan pemilih (voters education) bagi generasi muda sebagai pemilih pemula yang memiliki jumlah sangat signifikan dalam kegiatan pemilihan.

Pendidikan bagi pemilih pemula memiliki peranan yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan daya kritis generasi muda tentang hak pilihnya, sehingga siswa (yang telah berusia 17 tahun) memiliki pemahaman akan pelaksanaan pemilu yang merupakan bagian dari proses demokrasi yang dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan begitu, siapa pun yang menduduki kursi kepemimpinan adalah mereka yang benar-benar berkualitas, memiliki integritas tinggi, jujur, adil, amanah, dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pendidikan politik merupakan metode preventif yang cukup efektif untuk mengeliminasi konflik massa dalam kegiatan politik. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan terkotak-kotak dalam beberapa kelompok menjadi pemicu munculnya konflik. Oleh karena itu, masyarakat, dalam hal ini generasi muda, diharapkan memiliki kecerdasan politik, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi mereka dapat menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politiknya, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk lebih memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan perorangan atau kelompok (Susilo, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 berbunyi bahwa pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk pemilih disebabkan ketentuan Undang- Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang pertama kali memakai hak pilihnya (Rahman, 2018). Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang diadakan setiap lima tahun sekali maka usia pemilih pemula terdiri dari individu yang berumur 17 sampai 21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh tingkat awal pendidikan tinggi, para pekerja yang baru lulus SMA atau bahkan anak SMA yang mendekati kelulusan. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap Pemilu cukup besar. Kedua, mereka adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam Pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui padangan mereka tentang

demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan. Maka dari itu, Pendidikan Politik terhadap para pemilih pemula ini patut diperhatikan dan di rencanakan sebaik mungkin, sehingga mereka memiliki kompetensi yang layak dalam memilih pemimpin dan tentunya mewujudkan demokrasi di Indonesia yang lebih substansial.

Pendapat selanjutnya dari Akinsolu dan Orit (2004) dalam penelitiannya mengatakan, Pendidikan politik juga dikenal sebagai sosialisasi politik (political socialization) atau pembelajaran politik (political learning) yang merupakan pengembangan sikap serta proses pembentukan perilaku politik seseorang. Pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengertian politik secara formal, seperti keterlibatan dalam kampanye partai politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik. Dalam proses pendidikan politik melibatkan semua golongan, baik golongan muda hingga golongan tua.

Tujuan pendidikan politik menurut ialah: Pertama, Membuat rakyat; Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik; Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap; Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Kedua, yaitu Memperhatikan dan mengupayakan: Peranan insani setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya); Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik); Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55), bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya; Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual); Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan Politik harus ada tentunya untuk meningkatkan partisipasi politik yang dimana Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Miriam Budiharjo, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak secara individu untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi tersebut dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini berangkat dari masalah berdasarkan pencapaian partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024 yang berkaca dari jumlah partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 pasca pandemi. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengamati berbagai upaya yang dilakukan oleh KESBANGPOL KOTA PALANGKA RAYA dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian mengenai peranan Badan Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dalam pemilu 2024 serta dalam meminimalisir golput. Adapun informan yang dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi lapangan (observasi dan wawancara, dokumentasi). Adapun tahapan analisis

data dalam penelitian ini diantaranya wawancara, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.

**PEMBAHASAN**

Pendidikan politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, di mana yang menjadi sasaran pendidikan politik tersebut ialah partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat hingga generasi muda. Perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Dalam Pasal 12 ayat 5 (d) Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tersebut menjelaskan dan memaparkan berbagai tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya pada bidang politik dalam negeri untuk melaksanakan pendidikan politik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Subjek penelitian dalam penelitian ini pegawai kesbangpol di Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Koordinator Politik Dalam negeri dan Peningkatan Demokrasi.

**Peran Badan Kesbangpol Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Tahun 2024**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para subjek penelitian, menjelaskan gambaran tentang bagaimana kedudukan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Kesbangpol dalam Peraturan Walikota Kota Palangka Raya No. 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya adalah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesbangpol sendiri terdiri dari bidang-bidang salah satunya bidang politik dalam negeri dan sub bidang analisis kebijakan ahli muda pendidikan politik dan peningkatan demokrasi yang secara tugas dan fungsinya menjalankan program kerja terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat terkhusus pada pemilih pemula. Sebagaimana UU Pemilu Bab IV pasal 198 (Ayat 1), tentang pemilih pemula yang berbunyi “Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-Undang Pemilu”. Oleh karena itu pentingnya pendidikan politik terhadap pemilih pemula adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai warga masyarakat yang berpikir secara kritis, dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kepada pemilih pemula.

Tabel 1. Peran Kesbangpol

<b>Tugas</b>	<b>Rencana Kegiatan</b>	<b>Implementasi</b>
Badan Kesbangpol berperan dalam mengedukasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan analisis kebijakan. Fokusnya termasuk meningkatkan ketahanan nasional politik dan Pendidikan politik bagi pemilih pemula.	Badan Kesbangpol merencanakan program pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi untuk pemilih pemula (usia 17 tahun ke atas). Kesbangpol juga menyelenggarakan pendidikan politik melalui media online dengan kerjasama KPU dan Bawaslu. Tujuannya adalah memberikan pelayanan pendidikan politik yang mudah diakses untuk pemilih pemula.	Pendidikan politik berpengaruh besar terhadap peningkatan demokrasi pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Perannya mencakup membentuk masyarakat mandiri dan kritis, mendorong kesadaran politik, serta mengurangi konflik dalam masyarakat.

## Ketercapaian Hasil Program dari Badan Kesbangpol dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

### a. Target Program Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merancang program kerja pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula dengan menargetkan para siswa-siswa menengah atas hingga perguruan tinggi tingkat pertama sebagai objek perealisasiannya. Dengan adanya penyelenggaraan program kerja tersebut diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun tidak hanya terpaksa kepada setiap menjelang pemilu ataupun pilkada hal ini dikarenakan pendidikan politik merupakan hal yang wajar dan wajib didapatkan untuk setiap warga negara Indonesia

### b. Realisasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Upaya Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik kepada pemilih pemula selalu dilaksanakan setiap tahun namun juga tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi salah satunya pandemi covid-19 menjadi kendala besar dalam pelaksanaan tersebut. Pasca pandemi sebagian besar program kerja Badan Kesbangpol tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan akses kepada objek pendidikan politik dan anggaran yang dialihkan pada bantuan sosial kemanusiaan. Pun segala aktivitas dikala itu dibatasi oleh karena adanya berbagai peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan saat pandemi.

## Capaian Program Kerja Pendidikan Politik Bagi Pemula

Berikut merupakan beberapa upaya dan capaian kegiatan dari program pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Palangka Raya:

### a. Tahun 2019

Menurut Subjek Penelitian I, sebelum pandemi terjadi (Tahun 2019), dalam menjalankan fungsinya kesbangpol bisa menyelenggarakan proses pendidikan politik secara maksimal dengan tatap muka langsung dengan para peserta. Pendidikan Politik Untuk pemilih pemula dilaksanakan melalui program safari/*roadshow* ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan agar para peserta didik SMA yang rata-rata berumur dari 17-19 Tahun yang merupakan usia dari pemilih pemula ini dilaksanakan dengan bertujuan agar para pemilih pemula dapat mecoblos dengan baik dalam pemilu maupun pilpres yang dilaksanakan pada tahun 2019. Selain itu, Subjek Penelitian II mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya penyuluhan ini adalah untuk menghindari penyebaran berita *hoax* atau berita palsu yang pada tahun 2019 cukup sering terjadi. Apalagi pemilih pemula merupakan salah satu kelompok yang rawan digiring opini atau berita palsu yang bisa membahayakan keamanan dan kondusivitas masyarakat.

### b. Tahun 2023-2024

Agenda yang akan direncanakan kesbangpol mulai memprioritaskan pemilih pemula dalam penyelenggaraan pendidikan politik, program yang dilaksanakannya antara lain melaksanakan kembali *roadshow* ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan penyuluhan kepada pemilih pemula. Setelah aturan PPKM dicabut oleh pemerintah pusat maka aktifitas kembali berjalan kondusif oleh karena itu upaya Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam memasifkan penyelenggaraan pendidikan politik kepada Pemilih pemula dengan mengadakan seminar wawasan kebangsaan dan pendidikan politik dini untuk mempersiapkan menghadapi pesta demokrasi 2024.

Gambar 2. Seminar Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan politik Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya bersama mahasiswa UMPR



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Peran kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pemilu 2024 Pemilu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan program kerja kesbangpol Kota Palangka Raya kepada pemilih pemula Kota Palangka dengan melakukan seminar wawasan kebangsaan. Akan tetapi dalam konteks efektivitas Kesbangpol untuk menyelenggarakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih belum optimal dikarenakan banyaknya hambatan. Hambatan yang dialami kesbangpol kota Palangka Raya salah satunya keterbatasan fasilitas yang memadai sebagai media penyampaian informasi dan sebagai terkait dengan rencana penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kalangan siswa dan mahasiswa yang berstatus sebagai pemilih pemula.

Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian tentang peran Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Palangka Raya. Peneulis memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut sebagai berikut: Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu ikut serta dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas sejak dini. Bagi Kesbangpol, diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dengan materi yang lebih berinovasi guna menarik perhatian pemilih pemulada dalam pesta demokrasi. Bagi pemilih pemula, diharapkan agar selalu mengikuti isu dan perkembangan politik serta memahami cara menggunakan hak pilih saat pemilu mendatang.

## **Reference**

- Al Muchtar, Suwama. (2000). Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri.
- Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Algensindo
- Kartono, K. (1996). Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa. Bandung: Mandar Maju.
- Kesbangpol Kota Bandung. (2022). Modul Pendidikan Politik. Bandung
- Azis, Abdul.M. dkk. (2022). Upaya Badan Kesbangpol Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2885>.
- Dewi, Lintang Yunisha. dkk (2021), Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol 8 Nomor 1. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/4082/2190>.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 1 Nomor 1. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8385>.
- Suryani, E. I. (2019). Komunikasi Politik: Asal Usul dan Konsepsi. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Vol 5. <https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/29>.

- Sirait, F. E. T. (2020). Heuristik Dan Bias Perilaku Memilih Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Ekperimen Pengaruh Kecantikan dan Gelar Akademik Terhadap Preferensi Memilih Pemilih Muda). Universitas Indonesia.
- Hemas, Adeputra. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal. Universitas Negeri Semarang.
- Susilo, S. (2018). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. Diakses pada tanggal 5 November 2023. <https://kaltim.prokal.co/read/news/348262-pendidikan-politik-bagi-pemilih-pemula.html>